



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

# **BAGIAN ANGGARAN 059**

LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2012  
*(AUDITED)*



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2013

PLH SEKRETARIS JENDERAL,

ASHWIN SASONGKO

NIP. 195405161979021002





PERNYATAAN TELAH DIREVU

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kami telah merevui Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING

SUPRAWOTO





**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TAHUN 2012**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

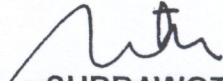
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2013

**PLT. INSPEKTUR JENDERAL,**

Pendapatan Negara	11.096.432.451.000	11.384.352.000.000	101,71%	2.885.520.549.000
Belanja Negara	10.117.254.717.000	10.390.339.911.794	102,64%	2.640.122.744.794

  
**SUPRAWOTO**

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp10.180.297.290.951,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6.762.552.592.294,00, Aset Tetap sebesar Rp2.862.867.818.122,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.007.810.222,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp453.758.910.323,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp5.173.125.491.360,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp4.997.170.799.573,00 yang terdiri





## I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.584.582.353.850,00 atau mencapai 104,40 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp11.096.432.484.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp2.690.559.911.794,00 atau mencapai 86,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.117.054.717.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011**

URAIAN	TAHUN 2012			TAHUN 2011
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	11,096,432,484,000	11,584,582,353,850	104.40	11,187,385,175,380
Belanja Negara	3,117,054,717,000	2,690,559,911,794	86.32	2,642,122,941,728

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp10.180.297.250.961,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6.762.562.592.294,00, Aset Tetap sebesar Rp2.962.967.938.122,00 Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.007.810.222,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp453.758.910.323,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp6.173.126.491.388,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp4.007.170.759.573,00 yang terdiri



dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp589.436.100.906,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.417.734.658.667,00

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011**

URAIAN	TANGGAL NERACA		KENAIKAN(PENURUNAN)	
	31-Dec-12	31-Dec-11	(Rp)	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	6,762,562,592,294	6,303,586,253,155	458,976,339,139	7.28
Aset Tetap	2,962,967,938,122	3,066,685,327,787	(103,717,389,665)	(3.38)
Piutang Jangka Panjang	1,007,810,222	781,663,184	226,147,038	28.93
Aset Lainnya	453,758,910,323	133,832,335,713	319,926,574,610	239.05
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>10,180,297,250,961</b>	<b>9,504,885,579,839</b>	<b>675,411,671,122</b>	<b>7.11</b>
<b>Kewajiban</b>			-	0
Kewajiban Jangka Pendek	6,173,126,491,388	6,043,419,158,899	129,707,332,489	2.15
<b>Ekuitas Dana</b>			-	
Ekuitas Dana Lancar	589,436,100,906	260,167,094,256	329,269,006,650	126.56
Ekuitas Dana Investasi	3,417,734,658,667	3,201,299,326,684	216,435,331,983	6.76
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>4,007,170,759,573</b>	<b>3,461,466,420,940</b>	<b>545,704,338,633</b>	<b>15.77</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>10,180,297,250,961</b>	<b>9,504,885,579,839</b>	<b>675,411,671,122</b>	<b>7.11</b>

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



## IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

Dasar  
Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

#### A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana  
Strategis

Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika yang meliputi Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Multimedia dan Diseminasi Informasi.

Untuk memenuhi tujuan tersebut disusunlah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011-2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/1/2011.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

#### VISI :

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

#### MISI :

- 1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
- 2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;

- 3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
- 4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
- 5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Tujuan dan Sasaran Kemkominfo adalah sebagai berikut :

## 1. Tujuan

### 1.1 Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi

- 1) Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (*competition readiness index*) baik, yaitu sekurang-kurangnya 49 persen dari total jumlah provinsi di seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51 persen dengan indeks menengah;
- 2) Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah *blank spot* dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014:
  - (a). Jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO;
  - (b). Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi (USO);
  - (c). Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 88 persen dan 90 persen.
- 3) Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014:
  - (a). Tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen;
  - (b). Tingkat penetrasi pengguna layanan *broadband* sekurang-kurangnya 30 persen;
  - (c). Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 35 persen;
  - (d). Jaringan *backbone* telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau besar mencapai 100 persen; serta
  - (e). Jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung/terintegrasi ke dalam jaringan *backbone* serat optik nasional Palapa Ring mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dari total ibukota kabupaten/kota, termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013.



- 4) Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial dengan indikator dan dampak target capaian tahun 2014 :
- Desa yang dilayani akses internet mencapai 80 %;
  - Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara *broadband* mencapai 75%;
  - Ibukota provinsi yang memiliki *national internet exchange* mencapai 100% dengan catatan pelaksanaannya memenuhi kelayakan operasional;
  - Ibukota provinsi yang memiliki *international internet exchange* mencapai 100% yang terdiri dari 4 Ibukota provinsi, untuk ibukota provinsi yang lain, akan dibangun sesuai dengan kelayakan operasional.
- 5) Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 :
- Penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan *slot orbit* satelit mencapai 95%;
  - Ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung siaran TV Digital mencapai 50% wilayah jangkauan yang meliputi populasi. Terkait dengan ini akan digunakan *band* frekuensi yang layak secara teknis dan ekonomis (bukan di frekuensi 108 MHz yang diperuntukkan untuk penerbangan), sedangkan target disesuaikan dengan program digitalisasi.
- 6) Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum, dengan indikator dan target capaian tahun 2014:
- Tingkat utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio mencapai 70% (target capaian 100% sangat terpengaruh oleh pemanfaatan Spektrum Radio yang sangat tergantung pada nilai ekonomis dari suatu wilayah dan ketertarikan investor);
  - Pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP mencapai 100%;
  - Pengembangan sarana dan prasarana perizinan mencapai 100%;
  - Pelayanan spektrum frekuensi yang diproses tepat waktu mencapai 95 % (target 100% dapat tercapai apabila tidak terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin).
- 7) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain :
- Verifikasi terhadap pelaksanaan PSO Pos mencapai 100%;
  - Pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos diharapkan akan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai jika tidak terkendala oleh faktor eksternal : iklim/cuaca dan transportasi).
- 8) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain :
- Penetapan regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi mencapai 100 %, dengan jumlah paket disesuaikan dengan

- kebutuhan;
- (b). Kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi mencapai 90% (pada praktek untuk mencapai target 100% sulit, namun demikian telah disiapkan instrumen denda bagi penyelenggara yang tidak patuh);
  - (c). Kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi diharapkan akan mencapai 100%;
  - (d). Penyusunan dan pembahasan *ICT Fund* dan optimalisasi pemanfaatan PNBK, akan selesai 100%;
- 9) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain :
- (a). Pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri mencapai 100%;
  - (b). Ketepatan penyelesaian layanan perijinan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai apabila didukung oleh mekanisme perijinan yang melibatkan beberapa instansi, dapat berjalan dengan baik);
  - (c). Penyusunan *Grand Strategy* dan *Road Map* Penyelenggaraan Penyiaran, mencapai 100%;
- 10) Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain:
- (a). Penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 80% (target 100% terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi dan layanan elektronik);
  - (b). Sistem informasi pekerja migran akan mencapai 24 paket beserta operasional dan pemeliharaan.
- 11) Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran, dengan indikator dan capaian tahun 2014 antara lain : peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten mencapai 90% (tingkat kesulitan untuk mencapai target 100% cukup tinggi, karena berkembangnya keberagaman perangkat yang digunakan);
- 12) Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50 persen pada tahun 2014;
- 13) Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara *online* dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014:
- (a). Nilai rata-rata *e-government* instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4 dari keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkala);

- (b). Jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK sekurang-kurangnya menjadi 80 persen dari total aparatur pemerintah;
  - (c). Prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi mencapai 100 persen; serta (d) tersedianya layanan publik yang dapat diakses secara *online* sekurang-kurangnya untuk layanan kependudukan (*e-citizen*), perizinan (*e-licensing*), dan pengadaan (*e-procurement*).
- 14) Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014:
- (a). Prosentase alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 30 persen;
  - (b). Prosentase jumlah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 40 persen; dan (c) prosentase TKDN *set top box* TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30 persen.

## 1.2 Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain :
- (a). Penguatan media center di provinsi/kabupaten kota untuk 15 media center;
  - (b). Aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada masyarakat mencapai 80 %;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik, dengan indikator dan capaian target Tahun 2014 antara lain :
- (a). Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (Kelompok Informasi Masyarakat-KIM, media tradisional, dan media komunitas) di wilayah perbatasan yang dilaksanakan tepat waktu mencapai 80%;
  - (b). Fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel mencapai 90%;
- 3) Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain :
- (a). Pelaksanaan bimbingan teknik CIO untuk 2500 orang peserta;
  - (b). Pelaksanaan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencapai 2500 orang;
  - (c). Pelaksanaan program pemberian bea siswa bidang komunikasi dan informasi untuk 1398 mahasiswa;
  - (d). Peningkatan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi sejumlah 40 paket;



(e). Sertifikasi SDM komunikasi dan informasi mencapai 4980 orang.

